

## **KEPOLISIAN DAERAH JAMBI (1996 – 2008)**

**Dewi Ermayanti\***

\*Alumni Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unbari Jambi

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan memberikan penjelasan tentang bagaimana peranan Kepolisian Daerah Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 1996 – 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber sejarah yang digunakan berupa dokumen ataupun laporan resmi, buku-buku, artikel makalah, lewat studi kepustakaan, serta ditambah dengan hasil wawancara. Pendekatan yang digunakan yaitu langkah-langkah dan arah analisisnya, oleh karena itu sebagai landasan konseptual penulis menggunakan konsep Kepolisian Daerah Jambi dalam kurun waktu 1996 – 2008. Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokratisasi dan *civil society* menjadi dambaan masyarakat. Masyarakat menginginkan Polisi yang profesional. Polisi sipil yang humanis dan bersahabat dengan masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak. Polda Jambi dituntut melakukan berbagai perubahan dengan menghadirkan strategi perubahan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila Polda Jambi tidak melakukan strategi perubahan mengikuti perkembangan masyarakat, maka sudah bisa dipastikan kamtibmas yang diinginkan oleh masyarakat Jambi sulit tercapai.

**Kata Kunci** : Kepolisian, Daerah, Jambi

### **Abstract**

*This study aims to determine, and provide an explanation of how the role of the Jambi Regional Police in providing services to the community in the period 1996 – 2008. The research method used is the historical method, including heuristic stages, source criticism, interpretation, and historiography. The historical sources used are in the form of documents or official reports, books, paper articles, through literature studies, and added with the results of interviews. The approach used is the steps and direction of the analysis, therefore as a conceptual basis the author uses the Jambi Regional Police concept in the period 1996 - 2008. Individual behavior in daily life in society is closely related to roles. The results of the study show that democratization and civil society are the people's dreams. People want professional police. Civilian police who are humanist and friendly to the community are an absolute must. The Jambi Regional Police are required to make various changes by presenting a change strategy in providing protection, protection, and services to the community. If the Jambi Police do not implement a change strategy following the development of the community, it is certain that the Kamtibmas desired by the Jambi people will be difficult to achieve.*

**Keywords:** Police, Region, Jambi

### **A. PENDAHULUAN**

Kepolisian merupakan jenis pekerjaan yang tak jauh berbeda

dengan pendidikan dan pengobatan, yang memerlukan kedekatan dengan

kehidupan sosial. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, polisi harus mampu memahami tujuan yang hendak dicapai terlebih dahulu. Tanpa tujuan yang jelas, aktivitas organisasi akan menjadi tidak efisien. Demikian pula dengan peran mereka dalam masyarakat harus jelas sehingga dapat diformulasikan dengan terang dan tepat misi yang mereka emban.

Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UUD Kepolisian Negara).

Polisi bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di samping tugasnya sebagai alat penegak hukum negara. Mereka membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk itu, dibutuhkan suatu paradigma baru agar terjalin kedekatan hubungan antara polisi dan masyarakat. Tepatnya kemitraan yang harmonis dan upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Paradigma baru ini menitikberatkan pelaksanaan tugasnya pada upaya pencegahan (*preemptif, preventif*), dan meninggalkan paradigma lama yang lebih mengutamakan aspek penindakan (*represif*).

Paradigma baru yang melibatkan polisi dan masyarakat ini bernama Polmas (Perpolisian

Masyarakat). Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan (Sutanto, 2008:14).

Berhasilnya suatu tugas atau pekerjaan, biasanya ditunjang dengan perlengkapan dan teknologi yang digunakan menjadi salah satu ciri karyawan yang profesional. Opini pelanggan adalah hal yang penting karena mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan yang erat sekali kaitannya dengan kualitas pelayanan dari perusahaan itu sendiri.

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan ataupun dipenuhi kebutuhannya (Sutopo dan Suryanto, 2009:19).

Kualitas pelayanan jasa kepolisian Jambi dapat mempengaruhi persepsi individu yang kemudian mempengaruhi opini publik. Hal ini membuat perbedaan sikap dimasyarakat dan membentuk masyarakat menjadi dua bagian, yaitu sebagai pengguna jasa atau bukan sebagai pengguna jasa. Bukan pengguna jasa menurut penulis mungkin tidak memberi efek langsung kepada perusahaan, sedangkan pengguna jasa menurut penulis jelas merupakan denyut nadi dari sebuah perusahaan, tanpa

pengguna jasa tidak mungkin perusahaan dapat berdiri.

Berkaitan dengan pelayanan ada 2 (dua) istilah yang perlu diketahui yaitu melayani dan pelayan. Melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang, sedangkan pelayan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (*customer*/yang dilayani) yang bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki (Sutopo dan Suryanto. 2009:8).

Oleh karena itu kualitas pelayanan suatu perusahaan harus terus diperhatikan dan dijaga sehingga menimbulkan opini yang positif dan tidak membuat citra perusahaan menjadi merosot atau menjadi buruk, begitu juga dengan standar pelayanannya, dalam hal itu Kepolisian Daerah (Polda) Jambi.

Polda Jambi diresmikan oleh Kapolri Letjend Pol Drs. Diblyo Widodo pada tanggal 2 Oktober 1996. Polda Jambi merupakan penjabaran likuidasi Polda Sumbagsel yang sebelumnya merupakan kesatuan kewilayahan setingkat Polwil dengan kesatuan wilayah 1 (satu) Polresta, 6 (enam) Polres yaitu Polresta Jambi, Polres Batang Hari, Polres Tanjung Jabung, Polres Bungo Tebo, Polres Sarolangun Bangko dan Polres Kerinci. Validasi Polwil Jambi menjadi Polda Jambi merupakan hasil pertimbangan strategi pimpinan ABRI setelah melalui berbagai usul, saran dan masukan serta pertimbangan-pertimbangan pimpinan Polri dan pihak-pihak lain di luar Polri dalam mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan

dan kebutuhan organisasi Polri ke depan.

Polda Jambi memberikan kontribusi yang besar pada masyarakat Jambi. Polda Jambi mampu mengamankan berlangsungnya Harganas dengan sukses pada tahun 2008. Tingkat kedisiplinan dan humanisnya jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah lewat. Dalam menjalin kerja sama, Polda dengan pihak TNI memiliki hubungan yang sangat bagus. Koordinasi penyidik dengan pihak kejaksaan dalam menangani suatu perkara sangat baik, hal ini dapat terlihat pada penanganan berkas-berkas perkara yang selesai tepat waktu sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Polisi Daerah Jambi dalam menegakkan disiplin dapat dibanggakan. Terutama dalam menegakkan disiplin dalam kepolisian itu sendiri. Kedisiplinan itu terlihat dari tindakan polisi yang sudah berani memecat anggota yang bersalah, sementara di instansi lain belum seberani polisi dalam menghadapi anggota yang melanggar. Program Polmas yang mulai dijalankan sangat membantu dan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Dalam program ini masalah masyarakat diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Secara tidak langsung membantu pengadilan dalam mengatasi setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam berinteraksi dengan masyarakat, sebagian besar anggota Polda Jambi mulai tersenyum ramah apabila bertemu dengan masyarakat, memberikan penjelasan dengan lembut dan jelas ketika masyarakat

menanyakan masalah-masalah prosedur di kepolisian. Saat ini, Polda Jambi bisa menunjukkan jati dirinya sebagai Polisi Sipil yang humanis dan mampu berkomunikasi dengan baik bersama masyarakat. Semoga situasi ini dapat berlangsung menjadi lebih baik sehingga apa yang diinginkan masyarakat Jambi, yaitu terwujudnya kamtibmas dan kesejahteraan masyarakat Jambi dapat tercapai.

## **B. METODE**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan prosedur kerja penelitian observasi lapangan yang terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu :

### **1. Heuristik Pengumpulan Bahan**

Heuristik adalah menemukan serta mengumpulkan jejak-jejak dari peristiwa sejarah yang sebenarnya mencerminkan berbagai aktivitas manusia di waktu yang lampau. Pada tahap ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sumber sejarah dapat berupa bukti-bukti tertulis seperti dokumen dan sebagainya.

Sumber-sumber tulisan maupun lisan dibagi atas dua jenis yaitu :

#### **a. Sumber primer**

Sumber primer merupakan informasi dari kesaksian seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan panca indera yang lain atau dengan alat mekanis seperti diktafon yaitu alat atau orang yang hadir pada peristiwa sejarah. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterangan langsung dari orang yang terlibat secara langsung. Untuk mendapatkan

informasi penulis menggunakan metode wawancara.

#### **b. Sumber sekunder**

Sumber sekunder yang dimaksud disini adalah merupakan data-data yang didapatkan dari seorang atau lebih yang berada di luar kepemimpinan dan melakukan studi pustaka pada bagian yang termasuk sumber sekunder yang berupa koran, arsip, buku-buku, maupun data-data yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sumber ini yang dilakukan penulis adalah :

#### **a. Studi kepustakaan**

Dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **b. Studi kearsipan**

Penulis melakukan studi teknik pengumpulan data, dengan cara mempelajari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai data penelitian.

#### **c. Wawancara**

Mewawancarai pihak-pihak yang dapat memberikan kesaksian-kesaksian atau keterangan lisan berhubungan dengan topik-topik yang akan diteliti.

#### **d. Studi lapangan**

Studi lapangan atau observasi lapangan adalah suatu upaya untuk mendapatkan bukti atau menghimpun jejak dengan cara terjun langsung di lapangan objek peristiwa. Teknik ini bermanfaat untuk mendapatkan bahan perbandingan atau melengkapi data atau sumber tertulis dengan

keadaan yang sebenarnya di lapangan.

## 2. Kritik Sumber

Adalah proses penyaringan data-data untuk dijadikan fakta-fakta yang dijadikan sebagai bahan dalam penulisan ini, kritik sumber dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

### a. Kritik ekstren

Adalah pengujian otentisitas atau keaslian materialnya yang dapat dilakukan dengan melihat kualitas kertas, tinta bentuk huruf dan bahasa secara klimaks.

### b. Kritik intern

Dilakukan untuk menguji kesahihan (*validasi*) isi informasi yang terkandung di dalam data dengan melihat pengarangnya dan membandingkan dengan data/sumber yang lain (Darban. 2007:9).

## 3. Interpretasi

Adalah upaya penulis untuk menghubungkan berbagai fakta sehingga mendapat suatu gambaran yang logis dan sistematis. Atau menghubungkan dan mengkaitkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga fakta yang sesuai dengan yang lainnya kelihatan sebagai suatu rangkaian yang masuk akal.

Dalam menginterpretasikan penelitian dalam bentuk karangan sejarah ilmiah, sejarah kritis, perlu diperhatikan sandaran karangan yang logis menurut urutan yang kronologis dan tema yang jelas dan mudah dimengerti.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak memasukkan semua fakta yang diperoleh. Dalam proses interpretasi penulis memilih data yang relevan dengan permasalahan.

Data tersebut dihubungkan-hubungkan sehingga menjadi satu kesatuan kalimat yang bermakna.

## 4. Historiografi

Yaitu penyajian temuan atau rekomendasi secara keseluruhan dalam bentuk penulisan ilmiah (skripsi). Pada tahap ini penulis merangkai data-data yang diperoleh, sehingga ditemukan fakta didalamnya dan dihubungkan berdasarkan sebab akibat berdasarkan rumusan masalah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Kepolisian Daerah Jambi

Polda Jambi berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjaga keutuhan kamtibmas ini, Polda Jambi secara terus menerus berproses untuk memperbaiki kinerjanya selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum dengan berbagai perubahan bentuk organisasi searah kebijaksanaan pimpinan guna menjawab tantangan tugas ke depan. Polda Jambi bertekad untuk mampu memenuhi tuntutan tugas sebagai pengayom dan pelayan masyarakat serta selaku alat negara penegak hukum yang senantiasa menjunjung tinggi, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan kemandirian Polri serta selalu meningkatkan profesionalisme guna memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan ketentraman mewujudkan kamtibmas.

Cikal bakal berdirinya Polda Jambi berawal ketika berita Proklamasi pada tahun 1946 secara resmi disebarkan di Kota Jambi. Pada saat itu anggota Kepolisian bersama pemuda dan rakyat Kota

Jambi menurunkan semua bendera Jepang “Hinomaru” dan menaikkan bendera merah putih di semua tempat strategis. Pada tahun 1946 mulai terbentuk embrio Kesatuan Kepolisian Daerah berupa Kepolisian Keresidenan Jambi.

Sejarah terbentuknya cikal bakal Polda Jambi ini tercantum di buku sejarah “Perjuangan Kemerdekaan RI 1945 – 1949 di Propinsi Jambi. Dalam buku tersebut terdapat hasil rapat TKR tanggal 11 Januari 1946 yang dilakukan di Kabupaten Sarolangun ditetapkan pembentukan Tri Resimen II Divisi II/Jambi. Komandan yang menjabat pada saat itu bernama Keisi Teuku Mochamad Insyah, dengan penyesuaian pangkat menjadi Letnan Kolonel. Pada tahun 1958 Kepolisian Daerah Jambi bernama Komisariat Kepolisian Jambi. Kepala Polisi Komisariat (KPKOM) Jambi yang pertama adalah Letkol Teuku Abdul Azis dan wakilnya Letkol R. Otong Wirahadi. Jabatan keduanya lalu digantikan oleh Letkol R. Moedjoko Koesoemodirjo dan wakilnya Letkol R. Ng. Mantopranoto.

Pada Tahun 1964 Kepolisian Komisariat berganti nama menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kondak) V. Markas Komando (Mako) terletak di Jalan Untung Surapati yaitu letak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Jalan Raden Mattaher sekarang. Pangdak V Jambi sebagai berikut : Letkol R. Soetioatmohadikoedoemo dengan masa jabatan tahun 1964 hingga 1965. Dilanjutkan oleh Kolonel Pol. Toekoe Soelaiman Mahmoed pada Tahun 1965 hingga 1969. Pada tanggal 17 Juni 1969 Kondak V Jambi berubah menjadi Kodak V

Jambi. Jabatan Pangdak oleh Kolonel Pol. Soenardjo dengan masa jabatan mulai Tahun 1970 sampai tahun 1973. Pada masa akhir jabatannya Kodak V Jambi dilikuidasi dan bergabung dengan Kodak V Sumbagsel (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Jambi) Kepolisian Jambi menjadi Daltares (Pengendali Antar Polres) dengan Dan Daltares Kolonel Polisi M. Ali Hanafiah.

Pada tahun 1974 Daltares berubah menjadi Komtares dengan wilayah meliputi Resort Kota (Resta) 631 Jambi, Resot 632 Batanghari, Resort 633 Sarolangun Bangko, Komtares pada era Dan Tares nya yaitu Kolonel Drs. Sri Yuwono berubah nama menjadi Kowil dan kemudian berubah kembali menjadi Kowil dan terakhir menjadi Polwil, dilanjutkan oleh beberapa Kapolwil penerus estafet kepemimpinan sebagai berikut : Kolonel Polisi Drs. Johni Haryono dengan masa pimpinan mulai dari tahun 1982 hingga tahun 1984. Kolonel Polisi Drs. Sariaman Panjaitan pada tahun 1984 hingga 1987. Selanjutnya Kolonel Polisi Drs. Usman Ibrahim memimpin pada tahun 1987 hingga 1989. Pada Tahun 1989 hingga 1991 dipimpin oleh Kolonel Polisi Drs. Syamsir Amiruddin. Tampuk kepemimpinan diteruskan oleh Kolonel Polisi Drs. Syahrel Achmad mulai dari tahun 1991 hingga tahun 1993. Kolonel Polisi Drs. Soeyono memimpin pada tahun 1993 hingga tahun 1994. Pada tahun 1994 Kolonel Polisi Drs. H. Syaiful Arsat, beliau memimpin hingga tahun 1996. Pimpinan dilanjutkan oleh Kolonel Polisi Drs. Solihin pada Tahun 1996.

Polda Jambi diresmikan oleh Kapolri Letjend Pol Drs. Dibyso Widodo pada tanggal 2 Oktober 1996. Polda Jambi merupakan penjabaran likuidasi Polda Sumbagsel yang sebelumnya merupakan kesatuan kewilayahan setingkat Polwil dengan kesatuan wilayah 1 (satu) Polresta, 6 (enam) Polres yaitu Polresta Jambi, Polres Batang Hari, Polres Tanjung Jabung, Polres Bungo Tebo, Polres Sarolangun Bangko dan Polres Kerinci. Validasi Polwil Jambi menjadi Polda Jambi merupakan hasil pertimbangan strategi pimpinan ABRI setelah melalui berbagai usul, saran dan masukan serta pertimbangan-pertimbangan pimpinan Polri dan pihak-pihak lain di luar Polri dalam mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan dan kebutuhan organisasi Polri ke depan.

Periodisasi struktur pimpinan Kepolisian Daerah Jambi diawali dengan Kapolda Pertama yang dijabat oleh Kolonel Polisi Drs. Priestewa. M dengan periode masa jabatan mulai tanggal 2 Oktober 1996 sampai dengan tanggal 4 Desember 1998. Kolonel Polisi Drs. Maman Lukman sebagai Kapolda Kedua menjabat mulai tanggal 4 Desember 1998 sampai dengan 4 Desember 1999. Selanjutnya Kapolda Ketiga yang dimulai tanggal 4 Desember 1999 hingga tanggal 19 September 2000 dijabat oleh Drs. Ngusman Fu'ady. Jabatan sebagai Kapolda Keempat dipegang oleh Brigjend Polisi Drs. Zamris Anwar, M.Sc dengan periode masa jabatan mulai tanggal 19 September 2000 hingga 15 Mei 2001. Brigjend Polisi Drs. Toto S. Soewali sebagai

Kapolda Kelima menjabat tanggal 15 Mei 2001 hingga 10 April 2002. Jabatan Kapolda Keenam dilanjutkan oleh Brigdjen Polisi Drs. Mudjiyanto dengan periodisasi tanggal 10 April 2002 hingga 27 April 2004. Brigjend Polisi Drs. Soewadji sebagai Kapolda Ketujuh memiliki masa jabatan sejak tanggal 27 April 2004 hingga September 2007. Kapolda Jambi Kedelapan yang dimulai bulan September 2007 hingga Januari 2008 dijabat oleh Brigjend Polisi Drs. Carel Risakotta. Brigjend Polisi Drs. Budi Gunawan, SH, M, Si sebagai Kapolda Jambi kesembilan mulai menjabat pada bulan Januari 2008.

Kepolisian Daerah Jambi dari waktu ke waktu terus mengalami berbagai perubahan. Diantaranya perubahan era polisi sipil yang humanis, polisi yang memiliki peran lebih sebagai agen perubahan sosial yang menciptakan keamanan dan ketentraman guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kasus illegal logging yang marak terjadi sedikit demi sedikit mulai terungkap. Narkoba dan perjudian mulai terkikis.

Visi Kepolisian Daerah Jambi yakni “Menjadi polisi sipil yang profesional, bermoral, modern dan dipercaya serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif di wilayah Propinsi Jambi, yang diwujudkan dengan melakukan pembenahan ke dalam, menindak anggota Polri yang berbuat sewenang-wenang dan tidak menyakiti hati masyarakat”.

Sementara untuk Misi Kepolisian Daerah Jambi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektifitas tugas Polri dalam penegakan dan perlindungan hukum dengan senantiasa selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
- 2) Sebagai pelayan masyarakat untuk menjamin ketertiban dan memberikan rasa aman dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat Propinsi Jambi.
- 3) Sebagai pengayom masyarakat untuk dapat merebut simpati masyarakat dengan menampilkan perilaku Polri yang baik dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat dijadikan tauladan.
- 4) Mengembangkan Perpolisian Masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum dalam rangka pengendalian jumlah kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
- 5) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung tugas operasional tugas Polri.

## **2. Perubahan Status Kepolisian Daerah Jambi Pada Tahun 1996 Berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata RI Nomor : Kep/06/IX/1996**

Polda Jambi diresmikan oleh Kapolri Letjend Pol Drs. Dibyso Widodo pada tanggal 2 Oktober 1996. Polda Jambi merupakan penjabaran likuidasi Polda Sumbagsel yang sebelumnya merupakan kesatuan kewilayahan setingkat Polwil dengan kesatuan wilayah 1 (satu) Polresta, 6 (enam) Polres yaitu Polresta Jambi, Polres Batang Hari, Polres Tanjung Jabung, Polres Bungo Tebo, Polres

Sarolangun Bangko dan Polres Kerinci. Validasi Polwil Jambi menjadi Polda Jambi merupakan hasil pertimbangan strategi pimpinan ABRI setelah melalui berbagai usul, saran dan masukan serta pertimbangan-pertimbangan pimpinan Polri dan pihak-pihak lain di luar Polri dalam mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan dan kebutuhan organisasi Polri ke depan.

Pembentukan Polda Jambi didasari oleh: (1) Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: Kep/06/IX/1996 tanggal 10 September 1996 tentang Likuidasi Polda Sumbagsel, Jateng, Nusra dan SuAIselra, yang dalam hal ini antara lain terbentuk Polda Sumsel, Polda Lampung, Polda Bengkulu, dan Polda Jambi. (2) Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.: Kep/09/IX/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Likuidasi Polda Sumbagsel dan pengesahan pembentukan Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Bengkulu serta Polda Lampung ditetapkan Polwil Jambi dibentuk menjadi Satuan Wilayah Setingkat Polda Type C. (3) Instruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Ins/04/IX/1996 tentang Instruksi Peresmian Pembentukan Polda Sumsel, Jambi, Lampung dan Bengkulu pada tanggal 2 Oktober 1996 di Palembang. Sampai saat ini setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari jadi Polda Jambi.

Periodisasi struktur pimpinan Kepolisian Daerah Jambi diawali dengan Kapolda Pertama yang dijabat oleh Kolonel Polisi Drs. Priestewa. M dengan periode masa

jabatan mulai tanggal 2 Oktober 1996 sampai dengan tanggal 4 Desember 1998. Kolonel Polisi Drs. Maman Lukman sebagai Kapolda Kedua menjabat mulai tanggal 4 Desember 1998 sampai dengan 4 Desember 1999. Selanjutnya Kapolda Ketiga yang dimulai tanggal 4 Desember 1999 hingga tanggal 19 September 2000 dijabat oleh Drs. Ngusman Fu'ady. Jabatan sebagai Kapolda Keempat dipegang oleh Brigjend Polisi Drs. Zamris Anwar, M.Sc dengan periode masa jabatan mulai tanggal 19 September 2000 hingga 15 Mei 2001. Brigjend Polisi Drs. Toto S. Soewali sebagai Kapolda Kelima menjabat tanggal 15 Mei 2001 hingga 10 April 2002. Jabatan Kapolda Keenam dilanjutkan oleh Brigjend Polisi Drs. Mudjiyanto dengan periodisasi tanggal 10 April 2002 hingga 27 April 2004. Brigjend Polisi Drs. Soewadji sebagai Kapolda Ketujuh memiliki masa jabatan sejak tanggal 27 April 2004 hingga September 2007.

### **C. Peranan Kepolisian Daerah Jambi**

Menurut Soejono Sukanto pengertian peranan adalah bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang (Sukanto. 1985:440). Peranan lebih banyak menuju pada fungsi, penyesuaian dari, dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya bisa dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat didalam suatu masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Maka suatu peranan mencakup sedikit 3 hal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Levinson yaitu (1) peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam

masyarakat, (2) peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, (3) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosiologi (Masyudi. 1998:61).

Dalam pengertian sehari-hari, peranan diartikan sebagai perlakuan atas terjadinya suatu keadaan atau kondisi lain. Peranan diartikan sebagai sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pengertian ini mengandung makna bahwa peranan adalah merupakan suatu "sebab" agar terjadinya "akibat".

Berpedoman dari pengertian di atas, maka dalam penulisan ini peranan diartikan sebagai sesuatu perlakuan yang diharapkan dapat menjadi penyebab (melalui suatu proses) sehingga terjadinya suatu keadaan atau kondisi lainnya yang lebih baik dari sebelumnya.

Peranan kepolisian bukan sekedar membentang *police line* sehingga antara polisi dan masyarakat terdapat garis yang membatasi. Tetapi kepolisian berperan dalam meluruskan *police line* sehingga ada persepsi yang lurus, ada kesamaan paradigma antara polisi dan masyarakat bahwa polisi dan masyarakat: antara polisi dan masyarakat merupakan satu kesatuan ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keamanan dan keutuhan negeri beradab.

Sejalan dengan program-program yang digariskan oleh Polri, Polda Jambi terus bertekad untuk menciptakan situasi kamtibmas yang harmonis. Dalam kerangka itu,

pencitraan Polri, aplikasi dan replikasi program kerja harus terus menerus dilakukan dan diadakan perbaikan dengan konstruksi yang lebih baik. Falsafah polisi masyarakat harus terus digalakkan ditengah masyarakat untuk memunculkan branding positif yang akan bermuara pada citra positif polisi di mata masyarakat.

Demikian pula perbaikan institusi yang menyangkut tata kelola dan remanajemen perlu direformasi menuju institusi Polri yang profesional, akuntabel dan mandiri.

Dalam hal menciptakan pola hubungan yang baru yang lebih harmonis antara polisi dan masyarakat, konsep polmas merupakan konsep yang tidak terbantahkan kualitasnya. Tinggal lagi bagaimana mengemas konsep ini berdasarkan kebutuhan tiap daerah yang secara budaya dan karakter wilayah memiliki perbedaan. Propinsi Jambi yang berangkat dari etnis melayu dan juga dihuni oleh berbagai etnik nusantara memiliki adat bawaan atau kebiasaan yang mengakulturasi ditengah masyarakat. Program polmas perlu disinkronisasikan dengan adat ini. Pemangku adat, tokoh masyarakat perlu dijadikan mitra dalam membentuk pola hubungan polisi dan masyarakat. Untuk itu nilai-nilai adat atau kebiasaan masyarakat setempat perlu dipelajari oleh personil polri yang ada di jajaran Polda Jambi sehingga dapat memecahkan persoalan yang ada ditengah masyarakat. Pranata adat yang memiliki sebaran cukup luas di berbagai wilayah propinsi Jambi tentu saja di tiap daerah juga berbeda sebagaimana adat mengatakan lain

lubuk lain belalang, lain daerah lain pula kebiasaannya. Personil Polri harus mampu beradaptasi di lingkungan manapun, Polri harus mampu memahami kebiasaan masyarakat setempat. Jika ini dapat dijalankan maka polmas sebagai falsafah baru yang didengungkan sebagai program unggulan akan dapat diwujudkan dan keberadaan Kepolisian Daerah Jambi sebagai institusi Polri mampu menjaga keamanan dan keutuhan negeri beradat.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Adanya tingkat pertumbuhan perekonomian Propinsi Jambi yang tidak termasuk dalam kategori tinggi di Indonesia, maka diperkirakan kondisi ekonomi di Jambi saat ini belum mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari kondisi sosial masyarakat, yaitu pengangguran belum berkurang sehingga potensi timbulnya kriminalitas di masyarakat relatif tinggi, gelandangan dan pengemis pun semakin banyak. Era reformasi yang terus bergulir di Indonesia telah membawa berbagai perubahan masyarakat Jambi. Demokratisasi dan *civil society* menjadi dambaan masyarakat. Masyarakat menginginkan Polisi yang profesional. Polisi sipil yang humanis dan bersahabat dengan masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak. Polda Jambi dituntut melakukan berbagai perubahan dengan menghadirkan strategi perubahan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila Polda Jambi tidak melakukan strategi perubahan mengikuti perkembangan

masyarakat, maka sudah bisa dipastikan kamtibmas yang diinginkan oleh masyarakat Jambi sulit tercapai.

Upaya Polda Jambi menjadi profesional seperti yang diinginkan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Permasalahan yang dihadapi Polda Jambi sangat kompleks. Citra Polisi di masyarakat masih tergolong rendah, begitu pula dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme Polri relatif masih rendah. Kondisi ini membuat Polda Jambi sulit.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Polda Jambi telah melakukan strategi perubahan yang terdapat dalam Rencana Strategi Kepolisian Daerah Jambi Tahun 2005–2009 yang memuat 19 kebijakan Kapolda Jambi untuk kurun waktu 2005–2009. Perubahan kebijakan itu merupakan sebuah strategi bagi Polda Jambi dan jajarannya. Hanya dengan menampilkan “Lima Lualan Searah Tujuan”. Seorang polisi di jajaran Polda Jambi bisa menunjukkan jati dirinya sebagai Polisi Sipil yang humanis dan mau berkomunikasi dari hati ke hati dengan masyarakat. Hanya dengan cara-cara seperti ini seorang polisi dapat mengurangi rasa takut masyarakat, baik terhadap ancaman kriminal, gangguan kamtibmas maupun kepada tampilan polisi sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002*. Babinkum Polri.

Sutanto, dkk. 2008. *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi*. Jambi.

Sutopo dan Adi Suryanto. 2009. *Pelayanan Prima*, Cet. Keempat, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Darban, Ahmad Adaby Darban. 2007. *Metode Penulisan Sejarah Lokal Antara Legenda dan Sejarah*. Seminar. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi.

Sukanto. 1985. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali.

Masyudi, Dedy I. 1998. *Pengantar Sosiologi Antropologi*. Bandung: Angkasa.